UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Semester Ganjil 2015

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor:272/Pid.B/2013/PN.BTM)

> NPM: 1251069 M.SOLEH NURSOFA

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat, Di Indonesia sendiri tingkat tindak kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan, Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undangundang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*). Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian diolah dan dianalisis, analisis yang digunakan secara kualitatif maksudnya dengan mengelompokkan data aspek - aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif.

peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *kedua*, Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang - undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor:272/Pid.B/2013/PN.BTM

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, penerapan sanksi pidana